

Media Cetak	Koran Sindo
Tanggal	Jumat 27 Desember 2024
Wilayah	Kabupaten Jeneponto



Anggaran Bantuan Ternak Diduga Dimanipulasi

Anggaran Bantuan Ternak Diduga Dimanipulasi

JENEPONTO - Pengadaan bantuan indukan ternak kuda, sapi dan kambing di Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto menjadi sorotan. Pasalnya, anggaran pengadaan ternak sekitar Rp1,3 miliar itu, diduga di-*mark-up*.

Dugaan itu memicu puluhan massa aksi dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Jeneponto (GPMJ) sempat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pertanian Jeneponto. Massa mempertanyakan terkait pengadaan hewan ternak kuda, sapi dan kambing yang menelan anggaran sekitar Rp1,3 miliar itu.

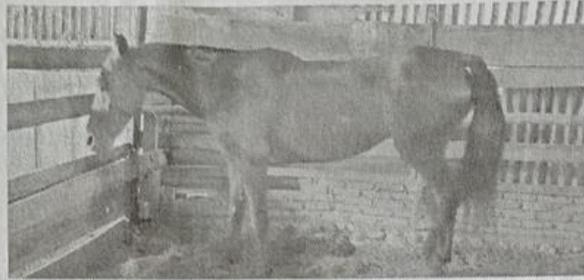
Massa meminta dilakukan audit khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) atas proyek pengadaan hewan ternak di Dinas Pertanian Jeneponto.

"Kami berharap BPK RI segera turun tangan untuk melakukan audit khusus dan memeriksa LPJ pengadaan hewan ternak," ujar salah satu pengunjukrasa.

Selain itu, massa mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, untuk memeriksa Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Peternakan, serta tiga perusahaan penyedia hewan ternak.

"Kami juga mendesak Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ini," tegasnya.

Pengunjuk rasa menduga ada *mark-up* dan gratifikasi dalam proyek pengadaan ternak di Kabupaten Jeneponto.



SINDO MAKASSAR/SULAIMAN NAI

Seekor kuda bantuan yang diterima warga mengalami luka di salah satu bagian tubuhnya. Kondisi hewan ini memicu sorotan warga. Selain itu, anggaran pengadaan bantuan ternak ini diduga dimanipulasi.

Berdasarkan investigasi internal mereka, harga kuda yang dibeli dari Manado hanya sekitar Rp27 hingga Rp30 juta per ekor, namun dalam proyek tersebut dilaporkan mencapai Rp65 sampai Rp70 juta per ekornya, bahkan bantuan kuda tersebut ada beberapa ekor yang terluka.

"Jika dibandingkan, harga kuda yang dibagikan jauh lebih mahal, namun kondisinya lebih buruk. Ini jelas ada kegagalan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Jeneponto, Achmad Tunru membantah tuduhan dari massa aksi yang menduga ada *mark-up* anggaran dan gratifikasi.

"Tidak ada permainan atau pengaturan dalam pengadaan ini, Saya bahkan tidak mengenal penyedia ternak," jelas Achmad saat dihubungi *SINDO Makassar*, Selasa lalu.

Bantuan ternak kuda, sapi dan kambing tersebut merupakan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Jeneponto. "Itu pokir dari anggota DPR Jeneponto, ada yang

aktif dan ada yang sudah tidak aktif tapi itu bantuan masih dia yang punya," ungkap Ahmad Tunru.

Ahmad Tunru menyarankan untuk menghubungi Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dinas Pertanian Jeneponto, drh Nurliani Syamsul untuk info lebih jelas terkait pengadaan bantuan ternak.

"Silahkan hubungi Kabid Peternakan untuk info lebih jelas, karena bidangnya dan dia tau soal pengadaan ternak," saran Kadis Pertanian Ahmad Tunru.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dinas Pertanian Jeneponto, drh Nurliani Syamsul dihubungi beberapa kali belum memberikan respons.

Diketahui, Pengadaan bantuan hewan ternak kembali dilakukan tahun ini oleh Pemda Jeneponto melalui Dinas Pertanian dengan anggaran Rp1.321.356.000, yang terdiri dari: Pengadaan Kuda sebanyak 12 ekor dengan anggaran Rp795 juta, disalurkan melalui CV Sang Dwija Amawabhumi.

□ *sulaiman nai*